



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 242/UN26.12/PP.02.00.00/2022

TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR PERKULIAHAN SEMESTER GENAP (2)
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Perkuliahan Semester Genap (2) TA 2021/2022 Program Studi Magister Ilmu Hukum segera dilaksanakan, untuk itu perlu mengangkat tenaga pengajar pada kegiatan perkuliahan tersebut;
 - b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengasuh mata kuliah yang tercantum dalam kolom 5 (lima) daftar lampiran surat keputusan ini;
 - c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

- Mengingat :
1. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. PP No. 32 Tahun 2013 jo PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Kepres RI No. 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 7. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 8. Permendikbud RI No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Lampung;
 9. Permenristek dan Dikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 10. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 11. Kemendikbud No. 134149/RHS/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung
 12. Keputusan Rektor No. 1946/UN26/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Unila.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM TENTANG PENGANGKATAN DOSEN MENGAJAR PERKULIAHAN SEMESTER GENAP (2) TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

- KESATU : Terhitung dari tanggal 14-02-2022 mengangkat dosen yang namanya tercantum dalam kolom 2 (dua) serta jabatan yang tersebut dalam kolom 3 (tiga), mengasuh mata kuliah sebagaimana tercantum dalam kolom 5 (lima) daftar lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Kepada mereka akan diberikan Poin Remunerasi, dengan ketentuan melaksanakan kegiatan akademik Semester Genap (2) TA 2021/2022 sampai selesai.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 15 Februari 2022

M. FAKIH
NIP. 19641218 198803 1 002

NO.	NAMA DOSEN	GOL/JABATAN	SKS	MATA KULIAH
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. NIP 19621109 198703 1 003	IV/d Guru Besar	2 2	1. Hukum Internasional Publik (Kelas B1). 2. Hukum Internasional Publik (Kelas B2).
2.	Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. NIP 19630916 198703 1 005	IV/d Guru Besar	2 2 2 2	1. Hukum Lingkungan (Kelas A1). 2. Hukum Lingkungan (Kelas A2). 3. Hukum Lingkungan (Kelas B1). 4. Hukum Lingkungan (Kelas B2).
3.	Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum. NIP 19600310 198703 1 002	IV/c Guru Besar	2 2	1. Politik Hukum Pidana (Kelas B1). 2. Politik Hukum Pidana (Kelas B2).
4.	Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum. NIP 19620514 198703 1 003	IV/d Guru Besar	2 2	1. Hukum Otonomi Daerah (Kelas A1). 2. Hukum Otonomi Daerah (Kelas A2).
5.	Prof. Dr. I. Gede AB Wiranata, S.H., M.H. NIP 19621109 198811 1 001	IV/d Guru Besar	2 2 2 2	1. Hukum Dagang Internasional (Kelas A1). 2. Hukum Dagang Internasional (Kelas A2). 3. Hukum Dagang Internasional (Kelas B1). 4. Hukum Dagang Internasional (Kelas B2).
6.	Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. NIP 19550106 198003 2 001	IV/c Guru Besar	2 2	1. Politik Hukum Pidana (Kelas A1). 2. Politik Hukum Pidana (Kelas A2).
7.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, M. Kes. NIP 19690515 200112 1 004	IV/a Guru Besar	2 2 2	1. Etika Profesi Kesehatan (Kelas A1). 2. Hukum Medik dan Transaksi Terapeutik (Kelas B2). 3. Etika Profesi Kesehatan (Kelas B2).
8.	Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H. NIP 19690520 199802 1 001	IV/a Lektor Kepala	2 2 2 2	1. Metodologi Penelitian Hukum (Kelas A1). 2. Metodologi Penelitian Hukum (Kelas A2). 3. Hukum Kekayaan Intelektual (Kelas A1). 4. Hukum Kekayaan Intelektual (Kelas B1).
8.	Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum. NIP 19650622 199003 1 001	IV/c Lektor Kepala	2 2 2	1. Hukum Lingkungan (Kelas A1). 2. Hukum Lingkungan (Kelas A2). 3. Hukum Lingkungan (Kelas B2).
9.	Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. NIP 19610912 198603 1 003	IV/b Lektor Kepala	2 2	1. Sistem Peradilan Pidana (Kelas B1). 2. Sistem Peradilan Pidana (Kelas A1).

10.	Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. NIP 19610715 198503 2 003	IV/c Lektor Kepala	2 2 2	1. Sistem Peradilan Pidana. (Kelas A2). 2. Sistem Peradilan Pidana (Kelas B2). 3. Sistem Peradilan Pidana (Kelas A1).
11.	Dr. Amnawaty, S.H., M.H. NIP 19570424 199010 2 001	IV/b Lektor Kepala	2 2 2	1. Hukum Kekayaan Intelektual (Kelas A2). 2. Metodologi Penelitian Hukum (Kelas B2). 3. Hukum Kekayaan Intelektual (Kelas B2).
12.	Dr. Yusnani Hasyimzum, S.H., M.Hum. NIK 241701511028201	Dosen Kontrak	2 2 2 2	1. Hukum Otonomi Daerah. (Kelas B1). 2. Hukum Otonomi Daerah. (Kelas B2). 3. Hukum Konstitusi dan Demokrasi (Kelas A2). 4. Hukum Konstitusi dan Demokrasi (Kelas A1).
13.	Dr. M. Fakih, S.H., M.S NIP 19641218 198803 1 002	IV/a Lektor Kepala	2 2 2 2 2 2 2	1. Etika Profesi Kesehatan. (Kelas A1). 2. Etika Profesi Kesehatan (Kelas B1). 3. Hukum Medik dan Transaksi. Terapeutik (Kelas A1). 4. Etika Profesi Kesehatan (Kelas B2). 5. Hukum Medik dan Transaksi. Terapeutik (Kelas A2). 6. Hukum Medik dan Transaksi Terapeutik (Kelas B1). 7. Etika Profesi Kesehatan (Kelas A2).
14.	Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H. NIP 19610930 198702 1 001	IV/a Lektor Kepala	2 2	1. Metodologi Penelitian Hukum. (Kelas B1). 2. Metodologi Penelitian Hukum (Kelas B2).
15.	Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum. NIP 19601228 198903 1 001	IV/b Lektor Kepala	2 2 2	1. Hukum Medik dan Transaksi Terapeutik. (Kelas A1) 2. Hukum Medik dan Transaksi Terapeutik. (Kelas B1). 3. Hukum Medik dan Transaksi Terapeutik. (Kelas A2).
16.	Dr. Budiyono, S.H., M.H., CRA., CRP. NIP 19741019 200501 1 00 2	III/c Lektor Kepala	2 2	1. Hukum Otonomi Daerah. (Kelas B1). 2. Hukum Otonomi Daerah. (Kelas B2).
17.	Rohaini, S.H., M.H., Ph.D NIP 19810215 200812 2 001	III/d Lektor	2 2 2 2 2 2 2	1. Hukum Dagang Internasional. (Kelas A1). 2. Hukum Dagang Internasional. (Kelas A2). 3. Hukum Kekayaan Intelektual (Kelas B1). 4. Hukum Dagang Internasional (Kelas B1). 5. Hukum Kekayaan Intelektual (Kelas B2). 6. Hukum Dagang Internasional (Kelas B2). 7. Metodologi Penelitian Hukum (Kelas Mahasiswa Internasional).

18.	Rudy, S.H., LL.M., LL.D. NIP 19810104 200312 1 001	III/c Lektor Kepala	2 2 2	1. Hukum Konstitusi dan Demokrasi. (Kelas B1) 2. Hukum Konstitusi dan Demokrasi. (Kelas B2). 3. Hukum Konstitusi dan Demokrasi (Kelas Mahasiswa Internasional)
19.	Bayu Sujadmiko, S.H., M.H. Ph.D NIP 19850429 200812 1 001	III/c Lektor	2 2 2 2 2	1. Hukum Internasional Publik. (Kelas B1). 2. Hukum Internasional Publik. (Kelas B2) 3. Perbandingan Sistem Kenegaraan. (Kelas Mahasiswa Internasional). 4. Hukum Kekayaan Intelektual. (Kelas A1). 5. Hukum Kekayaan Intelektual (Kelas A2).
20.	Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA. NIP 19781231 200312 1 003	III/c Lektor	2 2	1. Hukum Internasional Publik. (Kelas A1). 2. Hukum Internasional Publik. (Kelas A2)
21.	Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A. NIP 19600807 199203 2 001	IV/c Lektor Kepala	2 2	1. Etika Profesi Kesehatan. (Kelas A1). 2. Etika Profesi Kesehatan. (Kelas B1).
22.	Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H. NIP 19681005 199403 2 001	III/d Lektor Kepala	2 2 2 2	1. Hukum Otonomi Daerah. (Kelas A1). 2. Hukum Otonomi Daerah (Kelas A2). 3. Hukum Konstitusi dan Demokrasi. (Kelas A1). 3. Hukum Konstitusi dan Demokrasi. (Kelas A2).
23.	Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. NIP 19650204 199003 1 004	IV/b Lektor Kepala	2 2 2 2	1. Politik Hukum Pidana. (Kelas A1). 2. Sistem Peradilan Pidana. (Kelas A2). 3. Politik Hukum Pidana. (Kelas A2). 4. Sistem Peradilan Pidana. (Kelas B2).
24.	Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D. NIP 19841010 200812 1 005	III/c Lektor	2 2 2 2	1. Hukum Lingkungan. (Kelas A1). 2. Hukum Lingkungan. (Kelas A2). 3. Hukum Lingkungan. (Kelas B1). 4. Hukum Lingkungan (Kelas Mahasiswa Internasional).
25.	Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H., M.H. NIP 19851023 200812 1 003	III/c Lektor	2 2 2 2 2 2	1. Hukum Konstitusi dan Demokrasi. (Kelas B2). 2. Perbandingan Sistem Kenegaraan. (Kelas A1). 3. Hukum Konstitusi dan Demokrasi. (Kelas B1). 4. Perbandingan Sistem Kenegaraan. (Kelas A2). 5. Perbandingan Sistem Kenegaraan (Kelas B2). 6. Hukum Otonomi Daerah (Kelas Mahasiswa Internasional).
26.	Dr. Muhtadi, S.H., M.H. NIP 19770124 200812 1 002	III/c Lektor	2 2 2 2	1. Perbandingan Sistem Kenegaraan. (Kelas A1). 2. Perbandingan Sistem Kenegaraan. (Kelas A2). 3. Metodologi Penelitian Hukum. (Kelas A1). 4. Metodologi Penelitian Hukum (Kelas A2).

27.	Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. NIP 19800102 200604 1 002	III/c Lektor	2 2	1. Perbandingan Sistem Kenegaraan. (Kelas B1). 2. Perbandingan Sistem Kenegaraan (Kelas B2).
28.	Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. NIP 19790506 200604 1 002	III/c Lektor	2 2 2	1. Sistem Peradilan Pidana. (Kelas B1). 2. Hukum Medik dan Transaksi Terapeutik (Kelas B2). 3. Politik Hukum Pidana (Kelas B2).
29.	Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. NIP 19800929 200801 2 023	III/c Lektor	2 2	1. Hukum Internasional Publik (Kelas A1). 2. Hukum Internasional Publik (Kelas A2).
30.	Prof. Dr. Rudi Haryanto, S.H., M.H.	Dosen Tamu	2 2	1. Sistem Peradilan Pidana. (Kelas B2). 2. Sistem Peradilan Pidana (Kelas B1).
31.	Dr. Sopian Sitepu, S.H., M.H., Mkn.	Dosen Tamu	2 2	1. Politik Hukum Pidana. (Kelas B1). 2. Politik Hukum Pidana (Kelas B2).
32.	Dr. Asri Agung Putra, S.H., M.H.	Dosen Tamu	2 2	1. Politik Hukum Pidana. (Kelas PJJ). 2. Politik Hukum Pidana. (Kelas B).

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 15 Februari 2022

DEKAN

M. FAKIH
NIP. 19641218 198803 1 002